

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2023

Volume 4, 2024





STATISTIK
PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2023
Volume 4, 2024

<https://sultra.bps.go.id>

STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2023

Nomor Publikasi : 74000.24042
Katalog : 4301002.74

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi+87 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Desain Sampul:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber Ilustrasi:
www.canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

TIM PENYUSUN
Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara 2023

Pengarah

Ir. SURIANTI TOAR, M.S

Penanggung Jawab

Muh. MULYADI, SST, M.E

Penyunting

Muh. MULYADI, SST, M.E

FATIMATUZ ZAHRO, S.Si

DENNY RIZKY FIRMANSYAH, S.Tr.Stat

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Tri HALISIR, S.Si

Penata Letak

Tri HALISIR, S.Si



KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan kunci untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi ini. Pendidikan menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang hidup. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia harus menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.

Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menggambarkan situasi pendidikan berdasarkan hasil Susenas Maret 2023. Data yang disajikan meliputi beberapa indikator dan capaian pendidikan. Selain itu, juga disajikan pula data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Tahun Ajaran 2022/2023. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, dan guru.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan pendidikan.

Kendari, Agustus 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tenggara

Ir. Surianti Toar, M.S



Ringkasan Eksekutif

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan negara dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan ini tertuang dalam Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional perlu diatur dalam suatu standar pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Oleh karena itu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai standar nasional pendidikan di Indonesia.

Sejak tahun 2020, gempuran pandemi Covid-19 di seluruh dunia tanpa kecuali di Indonesia berdampak pada seluruh sektor pemerintahan termasuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah-sekolah ditutup untuk meminimalisir penyebaran virus. Untuk melanjutkan pendidikan, pemerintah mengembangkan pendidikan berbasis teknologi dengan cara mendorong percepatan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sekolah-sekolah mulai mengadopsi platform pembelajaran daring, aplikasi pembelajaran, dan sistem manajemen pembelajaran untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Perubahan sistem manajemen pembelajaran yang sangat signifikan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 memiliki dampak di dunia pendidikan. Siswa dan pendidik dituntut untuk meningkatkan keterampilan teknologi dan literasi digital. Tuntutan peningkatan keterampilan teknologi tentunya harus seiring jalan dengan penyediaan infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia guna menciptakan kesetaraan dalam mengakses pendidikan.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, masyarakat diberikan kesempatan untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya, sehingga meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kualitas pendidikan yang diterima oleh individu memengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Pendidikan yang bermutu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif dan inovatif sehingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja global.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan manusia menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang terdidik cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan informasi, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Selain itu, pendidikan juga membantu dalam pengembangan kemampuan empati dan kepedulian sosial terhadap orang lain. Dengan belajar tentang keberagaman, memahami perspektif orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, individu dapat mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan sesama manusia.

Oleh karena itu, pendidikan memegang peran penting dalam mengembangkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Pendidikan membantu dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan berdaya saing tinggi. Individu yang terdidik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil serta berkarakter. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencanangkan Program Pendidikan untuk Semua (*education for All*) termasuk didalamnya Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar.

Pada tahun 2023, Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (3-6 tahun) di Sulawesi Tenggara sebesar 33,95 persen. APK PAUD di perkotaan sebesar 31,22 persen, lebih rendah dibandingkan di perdesaan yaitu 35,61 persen. APK PAUD anak laki-laki sebesar 34,09 persen, lebih tinggi jika dibandingkan anak perempuan 33,82 persen. Capaian ini masih tergolong rendah karena hanya satu dari tiga anak usia 3 sampai 6 tahun yang sekolah di PAUD.

Partisipasi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Nilai APK cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD/ sederajat APK SD/ sederajat sebesar 108,23 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 85,28 persen, APK SMA/ sederajat sebesar 90,31 dan APT Perguruan Tinggi sebesar 44,32 persen.

Negara selalu berusaha meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah sekolah mengalami peningkatan. Jenjang pendidikan dengan pertumbuhan sekolah tertinggi adalah MTs sebesar 6,01 persen dan SMK sebesar 5,73 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) untuk penduduk 15 tahun ke atas sebesar 96,03 persen. AMH kelompok umur 15-59 tahun dan 15 tahun ke atas memiliki pola yang sama yaitu kelompok penduduk yang memiliki AMH lebih rendah adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, atau penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun untuk kelompok umur 15-24 tahun, AMH untuk setiap karakteristik penduduk relatif sama. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan AMH di kelompok umur tersebut tidak begitu terlihat. Sebanyak 11,86 persen penduduk 15 tahun ke atas tidak mempunyai ijazah baik karena yang belum pernah bersekolah maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat dan hanya 15,11 persen yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel.....	xv
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Sistematika Penyajian	5
2. Metodologi.....	7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Metode Pengumpulan Data	9
2.3 Metode Analisis.....	9
2.4 Konsep dan Definisi	10
3. Keadaan Pendidikan di Sulawesi Tenggara.....	17
3.1 Pendidikan Anak Usia Dini.....	20
3.2 Partisipasi Sekolah.....	25
3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	26
3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	28
3.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM).....	29
3.3 Jumlah Sekolah Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas, Sanitasi Sekolah dan Jumlah Guru	31
3.3.1 Jumlah Sekolah	31
3.3.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas.....	33

3.3.2 Sanitasi Sekolah	33
3.3.4 Jumlah Guru.....	35
4. Capaian Pembangunan Pendidikan.....	41
4.1 Angka Melek Huruf (AHM)	43
4.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	45
4.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berdasarkan Ijazah yang dimiliki	47
4.4 Tingkat Penyelesaian Sekolah	48
5. Kegiatan Peserta Didik	75
5.1 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	77
5.2 Aktivitas Peserta Didik Selain Sekolah	82
Daftar Pustaka	85

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Partisipasi Anak Usia 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023	21
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023.....	22
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023.....	23
Gambar 3.4	Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023	25
Gambar 3.5	Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan (persen), 2022/2023	32
Gambar 4.1	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (dalam tahun) Penduduk Usia 15 tahun Ke Atas (tahun), 2010–2023.....	46
Gambar 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berdasarkan Ijazah/STTB yang Dimiliki (persen), 2023.....	47
Gambar 4.3	Tingkat Penyelesaian Sekolah Menurut Kelompok Umur (persen), 2023.....	49
Gambar 5.1	Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Internet (persen), 2019–2023.....	78
Gambar 5.2	Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Internet Menurut Wilayah (persen), 2019–2023.....	79
Gambar 5.3	Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer (persen), 2019–2023.....	80

Gambar 5.4	Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Internet Berdasarkan Tujuan Penggunaan (persen), 2019–2023.....	81
Gambar 5.5	Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga (persen), 2019–2023.....	82

<https://sultra.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2023 RPJMD dan Capaian Tahun, 2023	19
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah (persen), 2023.....	26
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (persen), 2023	27
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2023.....	29
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2023.....	30
Tabel 3.6	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2020/2021–2022/2023	31
Tabel 3.7	Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi (persen), 2022/2023.....	33
Tabel 3.8	Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecukupan Sumber Air (persen), 2022/2023.....	34
Tabel 3.9	Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kepemilikan Toilet Siswa (persen), 2022/2023.....	35
Tabel 3.10	Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan, 2022/2023.....	36
Tabel 3.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (persen), 2023.....	37
Tabel 3.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan kelompok Umur (persen), 2023.....	38

Tabel 3.13	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan kelompok Umur 2023.....	39
Tabel 4.1	Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2023.....	62
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki (persen), 2023.....	68
Tabel 4.3	Persentase Penduduk 0-6 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah (persen), 2023.....	71
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis (persen), 2023.....	53
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis (persen), 2023.....	57
Tabel 4.6	Persentase Penduduk Berumur 15-59 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis (persen), 2023.....	60
Tabel 4.7	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan (persen), 2023.....	63
Tabel 4.8	Persentase Penduduk Berumur 5-24 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan (persen), 2023.....	69

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hak dasar manusia. Pendidikan memegang peranan penting dalam menopang kehidupan seseorang, karena pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan juga merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Pendidikan menjadi perhatian banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Berbagai kebijakan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di Indonesia, pembangunan pendidikan dipercaya sebagai bagian dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Muara pembangunan pendidikan tercermin dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan, dalam forum internasional, pendidikan merupakan tujuan keempat *Sustainable Development Goals/SDGs* yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempertahankan kehidupan seseorang karena kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Masalah pendidikan seperti pendidikan yang tidak merata, diskriminasi jenis kelamin dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu “mahal” menjadi perhatian masyarakat global sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk

mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*) yang berisikan tujuan: (1) memperluas pendidikan usia dini, (2) menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib (Wajib Belajar), (3) meningkatkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), (4) meningkatkan angka melek huruf, (5) menghapus kesenjangan jenis kelamin, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan mengembangkan akses pendidikan anak usia dini, meningkatkan kesempatan dan infrastruktur pendidikan, mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum, serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan berkembangnya pendidikan yang berkualitas, masyarakat memiliki daya saing yang baik dan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga kualitas hidupnya lebih baik dari generasi sebelumnya.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah dan partisipasi pendidikan pra-sekolah (PAUD). Data disajikan menurut jenis kelamin, tipe daerah, dan keadaan ekonomi rumah tangga. Penyajian data ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan pendidikan di Wilayah Sulawesi Tenggara.

1.2 Tujuan

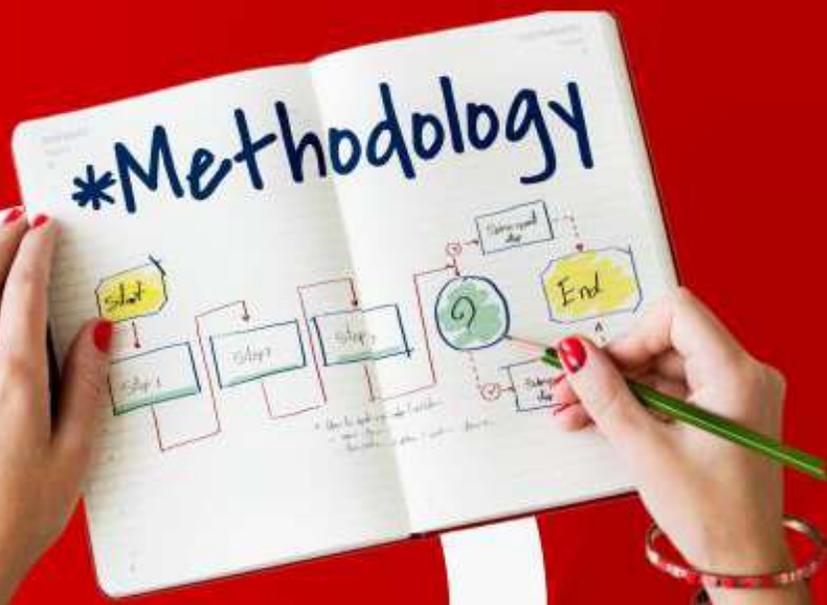
Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara edisi kali ini disusun untuk menggambarkan situasi dan perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gambaran umum dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah dan perkembangan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari indikator pendidikan tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan dan kebijakan program lainnya, khususnya di Provinsi

Sulawesi Tenggara. Selain itu, informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3 Sistematika Penyajian

Publikasi ini tersusun dalam empat bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika penyajian. Bab II membahas tentang sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta konsep dan definisi yang dipakai. Bab III membahas tentang keadaan pendidikan di Sulawesi Tenggara yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, dan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi jumlah sekolah, peserta didik, dan guru. Bab IV memberikan paparan tentang capaian pembangunan pendidikan yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Lampiran menyajikan tabel tentang indikator pendidikan menurut Kabupaten/Kota.

METODOLOGI WELODOLOGI



2.1 Sumber Data

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan data hasil pengolahan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan BPS pada Maret 2023. Survei ini mengumpulkan data tentang pendidikan seperti partisipasi sekolah, kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan, informasi umum pada anggota rumah tangga seperti jenis kelamin dan usia, selain itu informasi terkait lembaga pendidikan diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berasal dari Susenas dilakukan dengan melakukan pengolahan *raw data* untuk menghasilkan tabel-tabel yang dibutuhkan, sedangkan data fasilitas pendidikan bersumber dari Data Pokok Kependidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

2.3 Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara ini meliputi data pendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan pendidikan masyarakat. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan pendidikan penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis yang dilakukan bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

2.4 Konsep dan Definisi

Agar terhindar dari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, berikut dijelaskan konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini:

- a) **Tipe Daerah Tempat Tinggal** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b) **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 1 tahun dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat

menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- c) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C), serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud di sini adalah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

- d) **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- e) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

- f) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak Punya Ijazah SD adalah seseorang yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

SD sederajat meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SD Luar Biasa, Paket A, SPM/PDF Ulla, dan/atau sekolah dasar pamong.

SMP sederajat meliputi jenjang pendidikan SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMP Luar Biasa, Paket B, dan SPM/PDF Wustha.

SMA sederajat meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), SMLB, MAK, Paket C dan SPM/PDF Ulya.

SMK adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 Tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, Profesi, S2 dan S3.

g) **Partisipasi Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$APS_{7-12} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

$$APM_{SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SMP Usia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SMA Usia 16-18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APK SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

- h) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis Huruf Latin, Huruf Arab, atau huruf Lainnya.
- i) **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.
- j) **Rasio Guru-Murid** adalah perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu.
- k) **Tingkat Penyelesaian Sekolah** adalah presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Kelompok umur referensi menurut UNESCO adalah 3-5 tahun di atas batas usia kelas terakhir pada usia dari tiap jenjang pendidikan. Untuk indikator nasional di Indonesia kelompok umur referensi adalah 1-3 tahun diatas batas usia kelas terakhir pada usia dari

tiap jenjang pendidikan. Tingkat penyelesaian SD dihitung sebagai persentase penduduk umur 13-15 tahun yang minimal telah tamat SD. Terdapat tiga kelompok umur referensi yang digunakan dalam mengukur capaian tingkat penyelesaian sekolah, yaitu: tingkat penyelesaian SD penduduk umur 13-15 tahun, tingkat penyelesaian SMP penduduk umur 16-18 tahun, dan tingkat penyelesaian SMA penduduk umur 19-21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.

<https://sultra.bps.go.id>

KEADAAN PENDIDIKAN



Keadaan Pendidikan di Sulawesi Tenggara

3

Pendidikan dasar wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk membangun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka berbagai program pendidikan untuk mengalokasikan 20 persen APBN, terutama untuk daerah tertinggal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2023 merumuskan sasaran pembangunan pendidikan dengan target capaian tahun 2023 dan pencapaiannya sebagai berikut.

Tabel 3.1 Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2023 RPJMD dan Capaian Tahun 2023

Indikator	Target Tahun 2023 RPJMD ¹	Capaian Tahun 2023 ²	Perbandingan target dan capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
AMH	94,40	96,03	(+)
AMH 15-24	94,32	99,80	(+)
HLS	13,57	13,70	(+)
RLS	10,96	9,62	(-)
APK SMA/MA/SMK/Paket C	98,70	90,31	(-)
APM SMA/MA/SMK/Paket C	72,67	64,00	(-)
APS 16-18	72,94	74,60	(+)

Sumber: ¹bappeda.sultra.go.id

²Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa pemerintah lebih berhasil dalam melaksanakan program pendidikan yang sukses. Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa target RPJMD yang sudah tercapai 4 (empat) indikator yaitu Angka

Melek Huruf (AMH), AMH penduduk umur 15–24 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA sederajat. Ada 3 (tiga) Indikator lain masih berada di bawah target. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Sulawesi Tenggara untuk menyusun program dan kebijakan program yang lebih efektif di bidang pendidikan. Pada bab ini akan dijabarkan keadaan pendidikan tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Masa perkembangan anak dimulai dari masa awal kehidupan, sejak di dalam kandungan hingga usia tiga tahun. Usia dini merupakan masa *golden age*. Dalam perkembangan otak manusia, tahap perkembangan anak usia dini menempati posisi yang paling penting, terhitung 80 persen dari seluruh tahap perkembangan otak. Anak usia 0 hingga 6 tahun yang memiliki kesempatan pendidikan yang memadai lebih mungkin berhasil di masa depan.

Dalam upaya memaksimalkan perkembangan anak usia dini di Indonesia, pemerintah telah menetapkan program pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah kegiatan pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, guna meningkatkan pertumbuhan jasmani dan intelektualnya, pembinaan fisik dan mental dilakukan untuk mempersiapkan anak untuk pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat (Kemdikbud, 2020). Layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan di lembaga pendidikan antara lain berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) (Pendidikbud No 137 Tahun 2014). Pendidikan untuk anak usia dini bisa juga disebut sebagai pendidikan prasekolah.

Pengolahan Data Susenas Maret 2023, menunjukkan bahwa angka partisipasi pendidikan anak usia 0–6 tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai

26,17 persen. Tidak ada perbedaan atau disparitas jenis kelamin yang signifikan dalam partisipasi dalam pendidikan prasekolah. Persentase anak laki-laki usia 0–6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan (25,83 persen berbanding 26,51 persen).

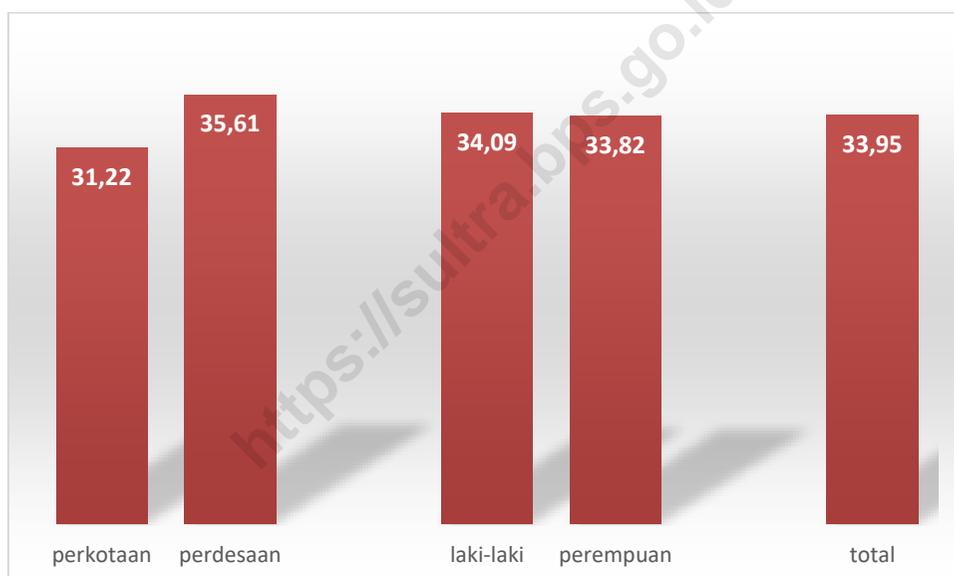
Hal yang sama juga terjadi pada partisipasi pendidikan prasekolah berdasarkan tipe daerah. Partisipasi prasekolah untuk daerah pedesaan (26,41 persen) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (25,75 persen) dengan selisih yang relatif kecil (0,66 persen poin). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan anak usia dini semakin baik, meskipun demikian capaian ini tetap perlu ditingkatkan. Beberapa program yang dapat dijalankan untuk mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan prasekolah antara lain: bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal, dan bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat (Permendikbud No 22 Tahun 2020). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023

Pada Gambar 3.2 terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD untuk anak usia 3–6 tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 33,95 persen. APK PAUD daerah perkotaan sebesar 31,22 persen, lebih rendah dibanding wilayah perdesaan yaitu 35,61 persen. APK PAUD anak laki-laki sebesar 34,09 persen, lebih tinggi jika dibandingkan anak perempuan 33,82 persen. Rendahnya nilai APK PAUD ini bisa disebabkan karena pola pikir praktisi pendidikan dan masyarakat yang belum mau memaksa anak-anak usia dini untuk mengikuti pembelajaran. Belajar sambil bermain lebih ditekankan agar anak tertarik dan bersemangat untuk mengikuti lagi kegiatan PAUD pada keesokan harinya.

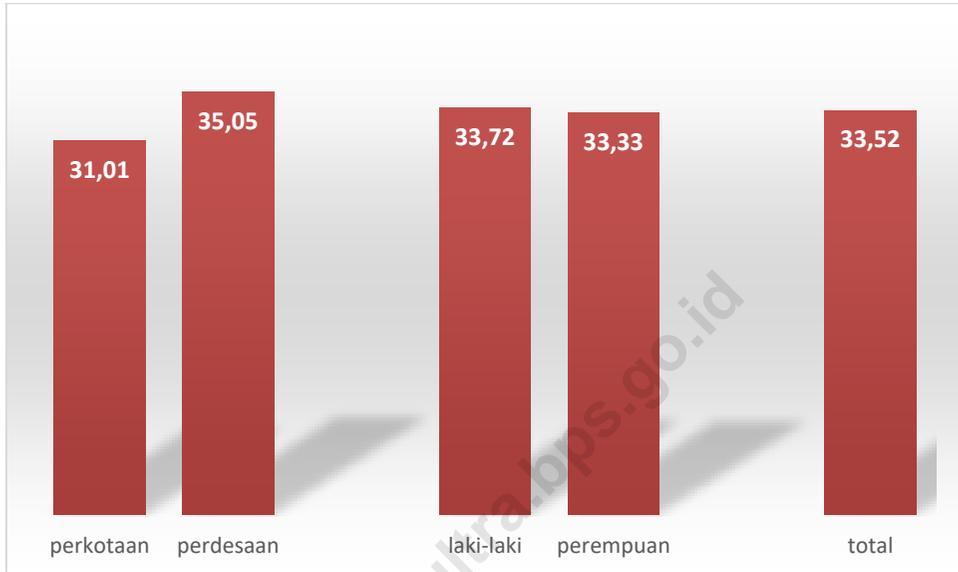


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.2 APK Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. APM PAUD anak usia 3-6 tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara Maret 2023 mencapai 33,52 persen. Di daerah

perkotaan, APM PAUD 31,01 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi yaitu sebesar 35,05 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin, APM PAUD anak laki-laki sedikit lebih tinggi yaitu 33,72 persen sedangkan anak perempuan 33,33 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.3 APM Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023

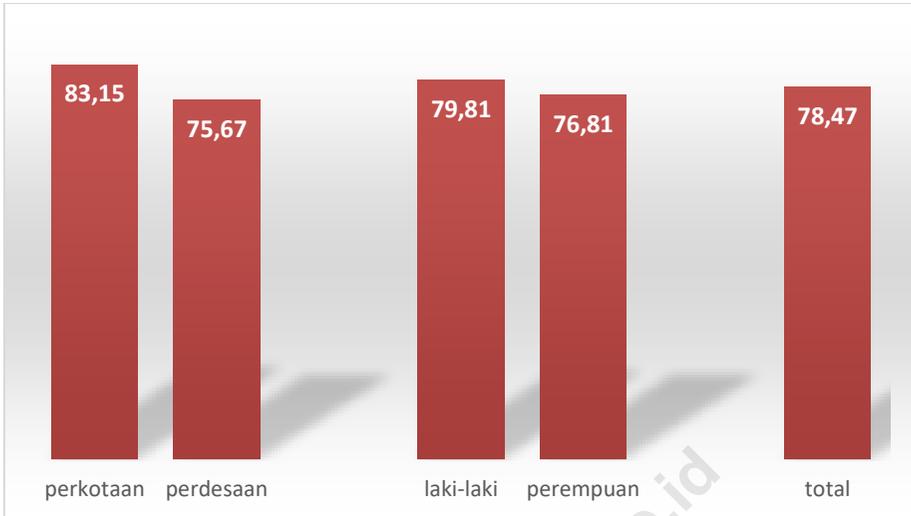
Kesiapan bersekolah (*school readiness*) menjadi landasan keberhasilan pendidikan anak di masa depan. UNICEF dalam *School Readiness: a conceptual framework*, 2012 menyatakan bahwa dimensi kesiapan sekolah (*school readiness*) meliputi 3 aspek, yaitu anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sekolah anak tergantung pada banyak faktor, tidak hanya pada anak itu sendiri. Secara khusus, penting untuk memiliki lingkungan sekolah yang mendukung kelancaran transisi ke pendidikan dasar, dan keterlibatan orang tua untuk mendukung dan membimbing perkembangan anak.

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan formal (sekolah dasar). Indikator yang tepat untuk mengukur

kesiapan anak masuk SD adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). AKS dihitung dengan membagi jumlah anak yang duduk di bangku kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD di tahun ajaran sebelumnya dengan jumlah seluruh siswa kelas 1 SD.

Pada tahun 2023, sebagian besar anak di Sulawesi Tenggara sudah siap masuk sekolah dasar. Pada Gambar 3.4, AKS di Provinsi Sulawesi Tenggara Maret 2023 sebesar 78,47 persen, artinya sekitar 8 diantara 10 anak yang duduk di kelas 1 SD/ sederajat dinilai sudah memiliki kesiapan sekolah.

Berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki (79,81 persen) dianggap lebih siap untuk sekolah dasar dibandingkan anak perempuan (76,81 persen). Sementara itu, terdapat kesenjangan antara AKS anak di wilayah perkotaan dengan pedesaan. Anak-anak di wilayah perkotaan memiliki AKS yang lebih tinggi (83,15 persen) dibandingkan anak-anak di pedesaan (75,67 persen). Kesiapan anak menuju sekolah tidak lepas dari pengaruh lingkungan tempat tinggalnya seperti dukungan keluarga dan stimulasi lingkungan. Selain itu, pengalaman prasekolah juga mempengaruhi kesiapan anak untuk bersekolah dikarenakan anak-anak telah terbiasa dengan interaksi ke teman sebaya dan memiliki pengalaman belajar yang formal sehingga membuat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, fasilitas yang tersedia di lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendukung kesiapan bersekolah bagi anak. Untuk meningkatkan kesiapan bersekolah bagi anak di daerah pedesaan dapat dilakukan dengan memperluas fasilitas dan infrastruktur PAUD yang dapat bersumber dari dana desa untuk memberi masyarakat insentif yang kuat sehingga dapat mendaftarkan anak-anak mereka di berbagai jenis pendidikan prasekolah dasar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.4 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2023

3.2 Partisipasi Sekolah

Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bertujuan untuk membekali warga negara Indonesia dengan kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah berupaya memperbanyak jumlah lembaga pendidikan, meningkatkan mutunya dan meningkatkan pemerataan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 6,19 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas tidak/belum pernah bersekolah, 28,87 persen sedang bersekolah, dan 64,93 persen sudah tidak bersekolah lagi. Berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan yang belum pernah sekolah (6,81 persen)

lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki (5,57 persen). Sebaliknya, proporsi penduduk laki-laki yang sedang bersekolah (29,09 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan (28,66 persen), begitupun juga pada kategori tidak bersekolah lagi dimana proporsi penduduk laki-laki (65,35 persen) lebih tinggi dari penduduk perempuan (64,53 persen).

Menurut tempat tinggal, proporsi penduduk perkotaan yang tidak/belum bersekolah (5,19 persen) lebih rendah dari penduduk perdesaan (6,82 persen), begitupun juga pada kategori tidak bersekolah lagi dimana proporsi penduduk laki-laki (63,72 persen) lebih rendah dibanding penduduk perdesaan (65,39 persen). Di sisi lain, proporsi penduduk yang bersekolah di perkotaan (31,08 persen) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (27,48 persen).

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah (persen), 2023

	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah bersekolah	Sedang Bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,19	28,87	64,93
Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,57	29,09	65,35
Perempuan	6,81	28,66	64,53
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	5,19	31,08	63,72
Perdesaan	6,82	27,48	65,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya

dikelompokkan menurut kelompok umur sekolah setiap jenjang pendidikan, yaitu TK (0–6 tahun), SD (7–12 tahun), SMP (13–15 tahun), dan SMA (16–18 tahun).

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa APS terbesar berada pada kelompok umur 7–12 tahun yaitu 99,20 persen atau dapat diartikan bahwa hampir semua anak usia 7–12 tahun masih bersekolah. Nilai APS semakin kecil seiring kenaikan kelompok umur. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah cenderung menurun seiring bertambahnya usia penduduk.

Dilihat menurut jenis kelamin, perempuan cenderung memberikan kontribusi lebih besar dalam partisipasi sekolah. APS perempuan pada semua kelompok umur lebih tinggi dari APS laki-laki pada kelompok umur yang sama. Sedangkan, jika dilihat menurut tipe daerah tempat tinggal, APS pada kelompok umur, 13–15 tahun, 16–18 tahun dan 19–23 tahun untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan semakin besar. Pada kelompok umur 19–23 tahun, APS di perkotaan 45,73 persen sedangkan di perdesaan 23,60 persen. Hal ini dikarenakan fasilitas pendidikan untuk usia tersebut pada tingkat diploma maupun sarjana, lebih banyak berada di perkotaan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (persen), 2023

	Kelompok Umur (tahun)			
	7–12	13–15	16–18	19–23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	99,20	95,00	74,60	33,59
Jenis Kelamin				
Laki-laki	99,14	93,95	71,45	30,00
Perempuan	99,26	96,07	77,97	37,08
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	99,08	96,02	79,19	45,73
Perdesaan	99,26	94,33	71,52	23,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tertentu. Jika jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100 persen. Nilai APK yang lebih dari 100 persen bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya siswa yang masuk suatu jenjang sekolah terlalu dini dibandingkan usianya, atau sebaliknya lebih lambat dari usianya, serta bisa disebabkan juga karena ada siswa yang tinggal kelas. Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga semakin rendah.

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa APK SD/ sederajat sebesar 108,23 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 85,28 persen, APK SMA/ sederajat sebesar 90,31 persen dan APK PT(19–23 tahun) sebesar 44,32 persen. Nilai APK pada jenjang SD melebihi 100 persen, artinya masih terdapat siswa SD di Sulawesi Tenggara yang berada di luar kelompok umur 7–12 tahun. Dengan kata lain, murid yang bersekolah SD lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia 7–12 tahun. APK SMP, SMA dan PT (19–23 tahun) masih di bawah 100 persen, artinya masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di SMP, SMA dan PT (19–23 tahun) pada kelompok umur 13–15 tahun, 16–18 tahun dan 19–23 tahun.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2023

	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	108,23	85,28	90,31	44,32
Jenis Kelamin				
Laki-laki	107,94	88,16	81,40	41,13
Perempuan	108,55	82,36	99,86	47,41
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	108,20	83,56	97,41	61,43
Perdesaan	108,25	86,42	85,55	30,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat, nilai APK perempuan lebih kecil dari nilai APK laki-laki sedangkan pada tingkat pendidikan lainnya APK perempuan lebih besar dari nilai APK laki-laki. Menurut tipe daerah tempat tinggal, APK SD dan SMP di wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Sedangkan pada tingkat SMA dan PT, nilai APK di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada wilayah perdesaan.

3.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan penduduk di luar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Tabel 3.5 memperlihatkan nilai APM jenjang SD/ sederajat sampai dengan APM PT pada setiap jenjang pendidikan masih belum menyentuh angka 100

persen. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Pada Tabel 3.5 terlihat bahwa APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 98,48 persen, APM SMP/ sederajat 76,54 persen, APM SMA/ sederajat sebesar 64,00 persen dan APM PT (19–23 tahun) sebesar 28,32 persen. Pola APM memiliki kemiripan dengan APK, nilainya semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan sehingga APM terkecil adalah APM PT yaitu sebesar 28,32 persen. Berdasarkan jenis kelamin, APM perempuan masih lebih rendah pada kategori SMP/ sederajat daripada APM laki-laki dan lebih tinggi pada kategori lainnya dibandingkan APM laki-laki.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2023

	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	98,48	76,54	64,00	28,32
Jenis Kelamin				
Laki-laki	98,16	77,76	59,89	25,27
Perempuan	98,83	75,31	68,42	31,28
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	98,68	77,40	69,94	41,22
Perdesaan	98,37	75,98	60,04	17,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Dilihat menurut tipe daerah tempat tinggal, APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, SMA/ sederajat dan PT, wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Perbedaan nilai tersebut semakin besar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Perbedaan nilai terbesar terlihat pada jenjang PT yaitu 41,22 persen di perkotaan, sementara di perdesaan hanya sebesar 17,70 persen.

3.3 Jumlah Sekolah, Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas, Sanitasi Sekolah, dan Jumlah Guru

3.3.1 Jumlah Sekolah

Mutu pendidikan ditentukan dari bagaimana kualitas penyelenggaraan atau pelayanan pendidikan yang meliputi kesiapan siswa, ketersediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, suasana lingkungan dan iklim sekolah (Supriyadi, 2009). Sarana pendidikan merupakan perlengkapan yang dipergunakan dan menunjang proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi belajar, serta alat-alat dan media pengajaran. Fasilitas pendidikan dalam publikasi ini dikhususkan pada jumlah sekolah.

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan (tahun), 2020/2021–2022/2023.

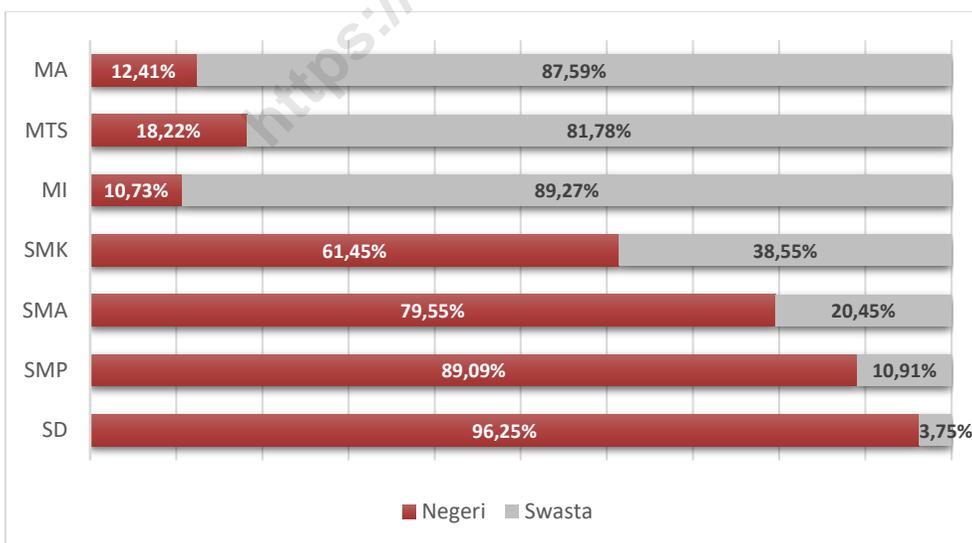
Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Persentase Pertumbuhan Sekolah 2020–2023
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	2.324	2.346	2.345	0,90
SMP	767	784	779	1,56
SMA	297	317	313	5,39
SMK	157	172	166	5,73
MI	176	181	177	0,57
MTs	233	243	247	6,01
MA	132	135	137	3,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023
Kementerian Agama (emis.kemenag.go.id)

Berdasarkan Tabel 3.6 terlihat bahwa jumlah sekolah pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Jenjang sekolah MTs memiliki pertumbuhan jumlah sekolah yang paling tinggi di antara

jenjang sekolah lainnya yaitu sebesar 6,01 persen. Kemudian diikuti oleh SMK di peringkat kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,73 persen, SMA sebesar 5,39 persen, dan yang terendah MI sebesar 0,57 persen.

Penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 3.5 memperlihatkan bahwa kontribusi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Tenggara cukup tinggi. Pada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persentase sekolah negeri terbanyak hanya ada di jenjang SD yaitu sebesar 96,25 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase sekolah swasta juga semakin tinggi. Persentase sekolah swasta pada jenjang SMP sebesar 10,91 persen, SMA sebesar 20,45 persen, dan SMK sebesar 38,55 persen. Pada sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, jumlah sekolah yang dikelola oleh swasta mendominasi pada semua jenjang. Persentase sekolah swasta pada MI sebesar 89,27 persen, MTs sebesar 81,78 persen, dan MA sebesar 87,59 persen.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)
Kementerian Agama (emis.kemenag.go.id)

Gambar 3.5 Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan (persen), 2022/2023

3.3.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas

Ruang kelas merupakan komponen prasarana sekolah yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Ruang kelas berfungsi sebagai tempat interaksi guru dan peserta didik selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif.

Jika dilihat dari kondisi dan keadaan ruang kelas, ruang kelas yang masuk dalam kategori baik di Sulawesi Tenggara pada tingkat pendidikan SD berada di bawah angka 50 persen atau tepatnya sebesar 43,35 persen. Ruang kelas berkategori baik juga tidak berbeda secara signifikan pada tingkat SMP, SMA dan SMK (tabel 3.7). Pada tingkat pendidikan SD masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat sebesar 13,20 persen, diikuti oleh tingkat pendidikan SMA sebesar 12,26 persen. Tingginya persentase kondisi ruang kelas yang rusak ringan sampai dengan rusak berat wajib menjadi prioritas pemerintah guna menjamin keamanan dan kenyamanan siswa dan tenaga pendidik dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Tabel 3.7 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi (persen), 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas		
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	43,35	43,45	13,20
SMP	52,10	38,11	9,78
SMA	52,15	35,59	12,26
SMK	50,41	39,88	9,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023

3.3.3 Sanitasi Sekolah

Sanitasi sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatnya akses sanitasi sekolah akan

berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan kenyamanan peserta didik dan secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan angka partisipasi sekolah. Oleh karena itu, sanitasi sekolah menjadi salah satu prioritas pembangunan yang termasuk dalam tujuan 4.a SDGs (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan pembangunan tersebut antara lain menggunakan proporsi sekolah dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin dan fasilitas cuci tangan yang terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) (Bappenas, 2020).

Pada tahun 2023, mayoritas sekolah pada setiap jenjang pendidikan telah memiliki sumber air cukup. Sementara itu, hanya sedikit sekolah yang tidak memiliki sumber air yaitu pada jenjang SD dengan sekitar 1,36 persen sekolah yang tidak memiliki sumber air.

Tabel 3.8 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecukupan Sumber Air (persen), 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	83,75	14,88	1,36
SMP	83,83	16,17	0,00
SMA	86,58	14,32	0,00
SMK	88,55	11,45	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023

Selain ketersediaan air yang cukup, keberadaan toilet sekolah juga menjadi aspek penting dalam mendukung proses pembelajaran. Sekolah yang sehat membutuhkan toilet yang seimbang dengan jumlah warga sekolah. Selain itu, ketersediaan toilet yang terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan siswa, membiasakan peserta didik agar selalu berperilaku sehat, dan memenuhi Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) bagi peserta didik perempuan.

Pada tahun ajaran 2022/2023 untuk jenjang pendidikan SD, 7 dari 10 sekolah telah memiliki sarana toilet siswa, baik itu toilet terpisah ataupun toilet

bersama. Jenjang pendidikan SD memiliki persentase kepemilikan toilet yang paling rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Terdapat 46,52 persen SD yang memiliki toilet terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan. Sementara itu, masih terdapat sekitar 30,32 persen SD yang tidak memiliki toilet. Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK, 8 dari 10 sekolah telah memiliki sarana toilet siswa, baik itu toilet terpisah atau bersama.

Tabel 3.9 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kepemilikan Toilet Siswa (persen), 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	46,52	23,16	30,32
SMP	69,45	13,09	17,46
SMA	65,18	16,93	17,89
SMK	62,05	15,06	22,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023

3.3.4 Jumlah Guru

Distribusi guru yang ideal dan menyeluruh masih menjadi tantangan pembangunan bidang pendidikan di Indonesia (Haekal, 2022). Terdapat daerah yang kelebihan guru, namun ada juga daerah lain yang kekurangan guru. Hal ini menyebabkan beban kerja guru di setiap daerah berbeda-beda. Beban kerja guru dapat dilihat melalui rasio guru-murid. Angka tersebut mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio guru-murid dalam sebuah sekolah, menunjukkan semakin berkurang efektivitas proses pembelajaran, dikarenakan tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang. Hal ini memberikan pengaruh juga pada mutu pengajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid, sementara pada jenjang SMK idealnya satu

guru bertanggung jawab pada 15 murid. Berdasarkan Tabel 3.10, terlihat bahwa rasio guru-murid pada semua jenjang pendidikan masih memenuhi standar ideal yang ditetapkan.

Tabel 3.10 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan, 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	23.308	292.049	1 : 13
SMP	12.802	120.269	1 : 9
SMA	7.586	94.258	1 : 12
SMK	3.631	36.131	1 : 10

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)

Rasio guru-murid dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah peserta didik (murid) dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-murid yang terlalu tinggi akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses pengajaran tidak efisien, karena guru mengajar sedikit siswa. Rasio guru-murid dapat bervariasi dan bergantung pada banyak faktor.

Pada Tabel 3.8 terlihat bahwa pada semua jenjang pendidikan, rasio guru-murid sudah berada di atas standar ideal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio minimal jumlah murid terhadap guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya adalah 20 orang. Sedangkan pada SMK idealnya adalah satu guru bertanggung jawab terhadap 15 murid. Meskipun demikian, rasio guru-murid bukan merupakan faktor mutlak dalam keberhasilan proses belajar anak. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan.

Tabel 3.11

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (persen), 2023

Kabupaten/Kota	7–12	13–15	16–18	19–23
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Buton	99,59	97,43	82,45	26,02
Muna	99,57	96,51	78,48	25,04
Konawe	98,77	93,26	70,61	26,68
Kolaka	99,47	94,78	71,75	23,86
Konawe Selatan	99,65	97,31	68,84	24,84
Bombana	99,37	89,12	62,52	14,83
Wakatobi	98,11	97,72	78,99	17,19
Kolaka Utara	99,93	91,54	64,27	14,08
Buton Utara	99,20	95,58	82,15	17,45
Konawe Utara	99,27	93,00	75,04	21,73
Kolaka Timur	99,19	96,53	66,93	19,83
Konawe Kepulauan	98,76	96,91	72,81	15,66
Muna Barat	97,84	91,37	81,22	19,01
Buton Tengah	99,59	94,85	92,48	22,70
Buton Selatan	99,83	96,17	68,33	30,36
Kendari	98,92	95,46	81,02	62,84
Baubau	98,28	97,01	78,87	50,42
Sulawesi Tenggara	99,20	95,00	74,60	33,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 3.12

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (persen), 2023

Kabupaten/Kota	7–12	13–15	16–18	19–23
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Buton	114,00	85,85	93,47	35,81
Muna	109,41	92,92	88,92	41,99
Konawe	108,04	86,23	86,67	28,67
Kolaka	113,23	79,44	92,37	33,62
Konawe Selatan	106,99	74,27	101,55	25,55
Bombana	110,59	66,72	88,42	23,11
Wakatobi	103,52	96,47	85,12	30,72
Kolaka Utara	105,83	96,43	71,31	25,04
Buton Utara	106,16	99,35	78,91	33,39
Konawe Utara	106,47	91,07	83,62	27,85
Kolaka Timur	104,53	87,20	82,42	22,63
Konawe Kepulauan	110,78	89,94	81,70	21,03
Muna Barat	104,32	99,21	77,85	21,93
Buton Tengah	105,41	84,24	113,96	29,60
Buton Selatan	108,08	95,06	71,00	42,55
Kendari	107,69	81,76	99,45	80,98
Baubau	109,53	92,03	89,01	69,96
Sulawesi Tenggara	108,23	85,28	90,31	44,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 3.14

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (persen), 2023

Kabupaten/Kota	7–12	13–15	16–18	19–23
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Buton	99,41	73,93	64,24	19,37
Muna	99,57	82,53	57,52	15,68
Konawe	95,98	73,61	65,82	22,33
Kolaka	99,20	73,64	63,39	18,85
Konawe Selatan	99,65	71,61	61,41	18,67
Bombana	99,37	62,04	56,34	10,26
Wakatobi	95,41	86,08	72,00	13,77
Kolaka Utara	96,62	71,95	44,63	10,92
Buton Utara	99,20	84,90	62,57	9,45
Konawe Utara	96,74	77,33	66,45	19,84
Kolaka Timur	97,72	74,08	56,45	17,67
Konawe Kepulauan	98,76	83,79	63,75	10,18
Muna Barat	97,84	87,07	66,17	10,42
Buton Tengah	99,59	77,75	78,29	10,78
Buton Selatan	99,83	83,12	54,38	24,13
Kendari	98,92	78,64	74,12	58,35
Baubau	98,00	84,68	67,89	45,03
Sulawesi Tenggara	98,48	76,54	64,00	28,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

CAPAIAN PEMBANGUNAN



Pembangunan pendidikan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjamin seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, yang dicirikan dengan: (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan; (2) hasil pembelajaran berkualitas; dan (3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi (Kemendikbud, 2020).

Dalam bab ini, indikator terkait pembangunan pendidikan yang akan dibahas antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat penyelesaian sekolah.

4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Membaca dan menulis merupakan keterampilan dasar yang menambah pengetahuan. Keterampilan membaca dan menulis yang baik membuat akses pengetahuan menjadi lebih terbuka. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH dapat diinterpretasikan sebagai seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada Pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf (AMH) (persen), 2023

(1)	Usia (tahun)		
	15–24 (2)	15–59 (3)	15+ (4)
Total	99,80	98,62	96,03
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,78	98,93	97,44
Perempuan	99,83	98,32	94,66
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	99,94	99,55	97,68
Perdesaan	99,93	98,01	94,96

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 15–59 tahun dan 15 tahun keatas terdapat pola yang sama. Kelompok penduduk yang memiliki AMH lebih rendah adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan atau penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun untuk kelompok umur 15–24 tahun, AMH untuk setiap karakteristik penduduk relatif sama. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan AMH di kelompok umur tersebut tidak begitu terlihat.

Mengingat bahwa prinsip utama SDGs adalah *“no one left behind”*, maka kemampuan literasi ketiga kelompok penduduk tersebut perlu menjadi fokus pemerintah. Kemampuan literasi penduduk yang meningkat akan memberikan *multiplier effect* dalam pembangunan karena berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya berdampak pula pada partisipasi penduduk dalam ketenagakerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, dan lain-lain.

Khusus penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas, tingkat literasi perempuan (94,66 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (97,44 persen). AMH di daerah perkotaan sebesar 97,68 persen sedangkan di perdesaan 94,96 persen. Untuk mencapai target RPJMD, perlu digalakkan program keaksaraan terutama kepada perempuan dan masyarakat perdesaan.

Angka melek huruf untuk kelompok remaja (15–24 tahun) hampir mencapai 100 persen, artinya hampir seluruh remaja mempunyai kemampuan literasi. Tidak ada perbedaan signifikan untuk jenis kelamin dan tipe wilayah untuk kategori usia 15–24 tahun. Mengingat tingginya tingkat literasi di kalangan anak muda, diharapkan anak muda lebih mampu mengasimilasi dan memahami informasi yang mereka terima. Diharapkan beberapa tahun ke depan, AMH di Indonesia akan semakin tinggi, sehingga dengan kemampuan literasi yang baik, akan mampu memberikan dampak lanjutan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Angka buta huruf di masing-masing kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah.

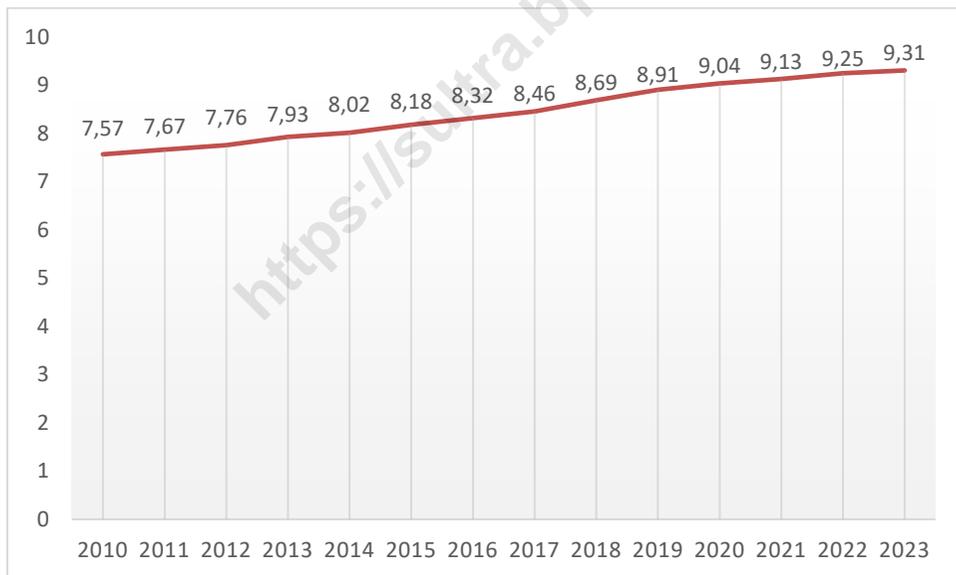
Dilihat dari sisi jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meskipun ada program bantuan, buta huruf di kalangan perempuan tetap tinggi. Hal ini mungkin karena sebagian besar masyarakat sasaran program buta aksara sibuk dengan pekerjaan dan pekerjaan rumah tangga, yang bukan merupakan cara terbaik untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Melihat lebih dekat pada kelompok usia muda mengungkapkan sedikit perbedaan dalam tingkat buta huruf antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan jenis kelamin yang semakin menipis dan rendahnya angka buta aksara di kalangan remaja menunjukkan bahwa penduduk semakin berpendidikan dan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin di masyarakat semakin menipis.

4.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1 dibawah ini menunjukkan bahwa RLS penduduk umur 25 tahun keatas pada tahun 2023 di Sulawesi Tenggara mencapai 9,31 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun keatas sudah mencapai jenjang pendidikan kelas 3 SMP (kelas IX) atau putus sekolah dikelas 1 SMA (Kelas X). RLS cenderung meningkat dari tahun 2010 hingga 2023.



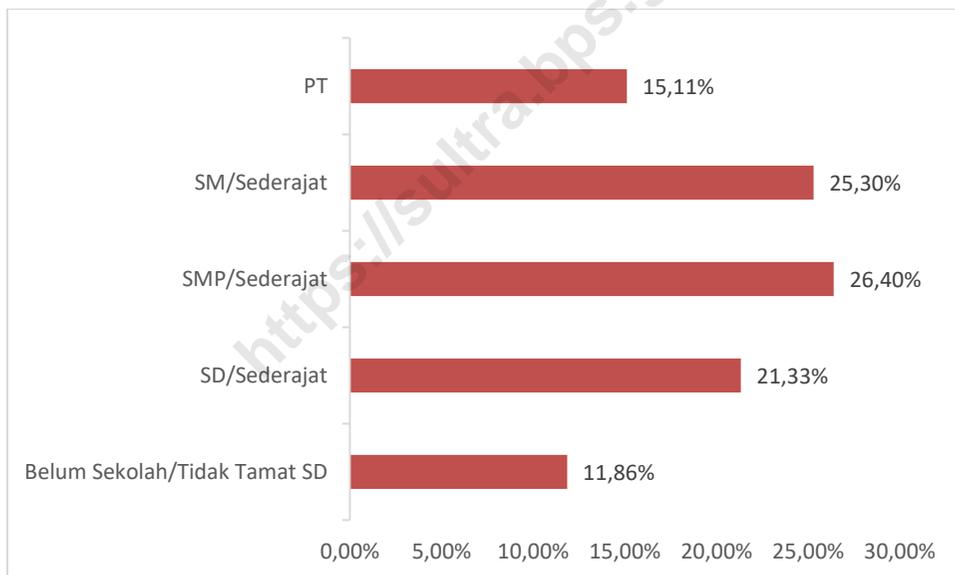
Sumber: sultra.bps.go.id

Gambar 4.1 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas (Tahun), 2010–2023

4.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berdasarkan Ijazah yang Dimiliki

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, suatu negara akan dapat menghadapi tantangan perubahan zaman.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga diharapkan bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

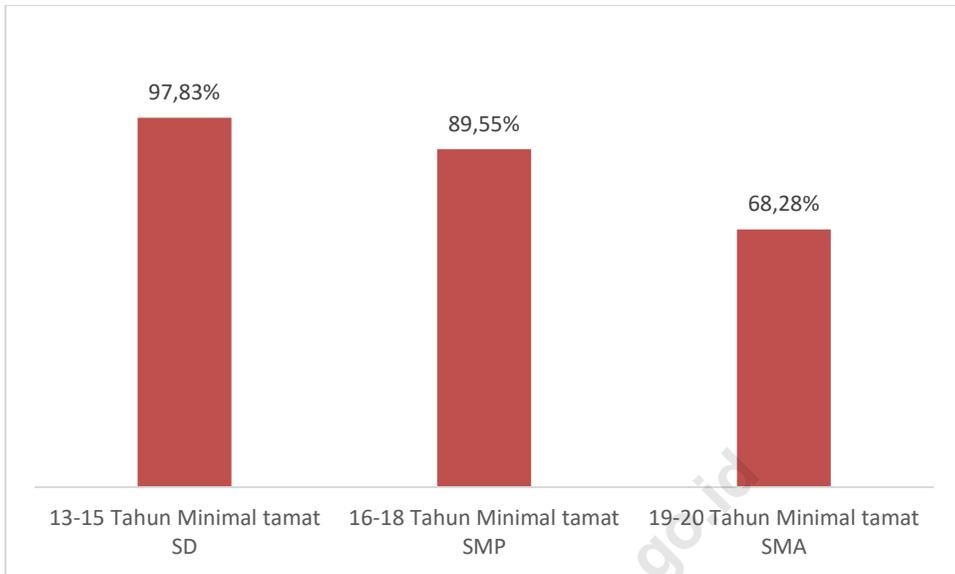
Gambar 4.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berdasarkan Ijazah/STTB yang dimiliki (persen), 2023

Gambaran kualitas SDM di Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas disajikan pada Gambar 4.2. Penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 21,33 persen menamatkan SD/ sederajat, 26,40 persen lulusan SMP/ sederajat, 25,30 persen tamatan SM/ sederajat, dan hanya 15,11 persen yang lulus dari perguruan tinggi (DI, DII, DIII, DIV/S1, S2, dan S3). Namun masih ada 11,86 persen penduduk 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah baik karena yang belum pernah bersekolah maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat. Tingginya masyarakat yang tidak mempunyai ijazah dapat disebabkan karena penduduk tua dan dewasa tidak mendapatkan akses yang baik untuk pendidikan di masa lalu.

4.4 Tingkat Penyelesaian Sekolah

Tingkat penyelesaian sekolah merupakan persentase penduduk pada umur referensi tertentu yang telah menamatkan jenjang pendidikan sesuai kelompok umurnya. Indikator ini menggambarkan banyaknya penduduk pada umur referensi yang masuk sekolah dan lulus tepat waktu pada tiap jenjang pendidikan. Umur referensi tingkat penyelesaian sekolah menurut UNESCO adalah 3–5 tahun di atas usia dimana umumnya siswa menduduki kelas terakhir pada jenjang pendidikan tertentu.

Indonesia mengadopsi indikator ini dengan penyesuaian umur referensi. Pada penghitungan indikator nasional, umur referensi yang digunakan adalah 1–3 tahun di atas usia dimana umumnya siswa menduduki kelas terakhir dari tiap jenjang pendidikan. Sehingga, terdapat tiga umur referensi pada penghitungan tingkat penyelesaian sekolah di Indonesia, yaitu: tingkat penyelesaian SD umur 13–15 tahun, tingkat penyelesaian SMP umur 16–18 tahun, dan tingkat penyelesaian SMA umur 19–21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan tingkat penyelesaian sekolah adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran (*school age*).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.3. Tingkat Penyelesaian Sekolah Menurut Kelompok Umur (persen), 2023

Dari Gambar 4.3, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Tingkat penyelesaian sekolah pada jenjang SD/ sederajat penduduk usia 13–15 tahun adalah 97,83 persen sedangkan tingkat penyelesaian sekolah pada jenjang SM/ sederajat penduduk usia 19–21 tahun adalah 68,28 persen.

Tabel 4.2

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki (persen), 2023

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Tidak punya	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma ke Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	12,89	21,87	29,45	25,32	10,47	100,00
Muna	12,56	24,35	26,60	23,86	12,63	100,00
Konawe	7,80	16,70	31,41	30,90	13,21	100,00
Kolaka	6,08	24,07	27,56	29,13	13,16	100,00
Konawe Selatan	9,47	25,25	30,55	24,71	10,02	100,00
Bombana	20,80	24,02	22,58	22,30	10,31	100,00
Wakatobi	13,38	27,25	26,89	20,42	12,07	100,00
Kolaka Utara	13,24	23,83	25,51	25,29	12,12	100,00
Buton Utara	11,28	22,71	29,00	21,04	15,97	100,00
Konawe Utara	6,63	22,85	28,07	28,42	14,02	100,00
Kolaka Timur	15,41	28,03	24,12	21,16	11,27	100,00
Konawe Kepulauan	9,06	20,29	26,89	29,02	14,73	100,00
Muna Barat	14,09	28,91	23,05	21,73	12,22	100,00
Buton Tengah	24,48	22,46	26,60	17,09	9,37	100,00
Buton Selatan	18,56	24,74	26,10	21,06	9,54	100,00
Kendari	3,76	11,39	23,61	35,17	26,08	100,00
Baubau	5,60	14,71	24,49	34,26	20,93	100,00
Sulawesi Tenggara	10,38	21,19	26,64	27,14	14,65	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.2

Perempuan

Kabupaten/Kota	Tidak punya	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma ke Atas	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	16,57	23,05	27,02	21,03	12,33	100,00
Muna	22,19	22,53	26,14	16,09	13,05	100,00
Konawe	11,12	19,79	29,46	26,02	13,61	100,00
Kolaka	8,19	24,01	26,49	26,27	15,03	100,00
Konawe Selatan	12,37	27,32	30,61	18,23	11,46	100,00
Bombana	20,18	23,96	26,00	15,36	14,50	100,00
Wakatobi	20,91	21,05	25,40	18,50	14,13	100,00
Kolaka Utara	14,72	25,39	22,74	20,95	16,20	100,00
Buton Utara	14,76	27,72	22,87	20,12	14,53	100,00
Konawe Utara	9,61	26,94	25,28	24,26	13,91	100,00
Kolaka Timur	15,48	26,79	23,12	20,94	13,67	100,00
Konawe Kepulauan	10,49	25,18	28,56	22,85	12,92	100,00
Muna Barat	19,56	25,67	22,93	14,97	16,88	100,00
Buton Tengah	32,68	20,82	23,74	13,16	9,62	100,00
Buton Selatan	20,00	29,33	23,21	18,82	8,63	100,00
Kendari	3,41	9,95	25,86	37,08	23,70	100,00
Baubau	6,75	15,04	24,77	31,92	21,52	100,00
Sulawesi Tenggara	13,29	21,47	26,17	23,51	15,56	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.2

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Tidak punya	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma ke Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	14,79	22,48	28,19	23,10	11,43	100,00
Muna	17,78	23,37	26,35	19,65	12,82	100,00
Konawe	9,42	18,21	30,45	28,51	14,30	100,00
Kolaka	7,13	24,04	27,03	27,71	14,09	100,00
Konawe Selatan	10,92	26,28	30,58	21,47	10,74	100,00
Bombana	20,49	23,99	24,31	18,78	12,43	100,00
Wakatobi	17,40	23,94	26,10	19,39	13,17	100,00
Kolaka Utara	13,97	24,60	24,15	23,15	14,13	100,00
Buton Utara	13,04	25,24	25,90	20,57	15,24	100,00
Konawe Utara	8,04	24,79	26,75	26,45	13,97	100,00
Kolaka Timur	15,45	27,41	23,62	21,05	12,48	100,00
Konawe Kepulauan	9,79	22,78	27,74	25,89	13,81	100,00
Muna Barat	16,99	27,18	22,99	18,14	14,69	100,00
Buton Tengah	28,95	21,56	25,04	14,94	9,51	100,00
Buton Selatan	19,32	27,16	24,58	19,88	9,06	100,00
Kendari	3,59	10,66	24,74	36,13	24,88	100,00
Baubau	6,20	14,88	24,64	33,04	21,24	100,00
Sulawesi Tenggara	11,86	21,33	26,40	25,30	15,11	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 4.3 Partisipasi Anak Usia 0–6 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah (persen), 2023

Kabupaten/Kota	Masih Mengikuti Pra Sekolah TA 2023/2024	Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2023/2024 atau Sebelum TA 2023/2024	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pra Sekolah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	20,15	11,90	67,95	100,00
Muna	20,52	7,70	71,78	100,00
Konawe	13,87	8,35	77,77	100,00
Kolaka	13,79	8,59	77,62	100,00
Konawe Selatan	17,39	3,50	79,11	100,00
Bombana	17,27	5,99	76,74	100,00
Wakatobi	25,57	7,73	66,69	100,00
Kolaka Utara	25,35	3,08	71,57	100,00
Buton Utara	20,87	6,34	72,79	100,00
Konawe Utara	26,95	7,68	65,37	100,00
Kolaka Timur	26,65	5,75	67,60	100,00
Konawe Kepulauan	29,63	9,17	61,20	100,00
Muna Barat	22,56	5,41	72,02	100,00
Buton Tengah	21,19	3,24	75,57	100,00
Buton Selatan	25,01	5,80	69,18	100,00
Kendari	16,22	7,58	76,21	100,00
Baubau	21,11	8,88	70,01	100,00
Sulawesi Tenggara	19,35	6,82	73,83	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis (persen), 2023

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	97,46	2,54	100,00
Muna	95,33	4,67	100,00
Konawe	98,08	1,92	100,00
Kolaka	99,40	0,60	100,00
Konawe Selatan	97,43	2,57	100,00
Bombana	95,82	4,18	100,00
Wakatobi	96,35	3,65	100,00
Kolaka Utara	95,86	4,14	100,00
Buton Utara	96,54	3,46	100,00
Konawe Utara	99,36	0,64	100,00
Kolaka Timur	95,06	4,91	100,00
Konawe Kepulauan	98,54	1,46	100,00
Muna Barat	97,58	2,42	100,00
Buton Tengah	92,54	7,46	100,00
Buton Selatan	94,73	5,27	100,00
Kendari	99,92	0,08	100,00
Baubau	97,98	2,02	100,00
Sulawesi Tenggara	97,44	2,56	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.4

Perempuan

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	94,39	5,61	100,00
Muna	88,31	11,69	100,00
Konawe	96,20	3,80	100,00
Kolaka	97,40	2,60	100,00
Konawe Selatan	94,79	5,21	100,00
Bombana	92,98	7,02	100,00
Wakatobi	93,53	6,47	100,00
Kolaka Utara	95,84	4,16	100,00
Buton Utara	92,67	7,33	100,00
Konawe Utara	96,94	3,06	100,00
Kolaka Timur	92,81	7,19	100,00
Konawe Kepulauan	97,96	2,04	100,00
Muna Barat	92,46	7,54	100,00
Buton Tengah	83,54	16,46	100,00
Buton Selatan	91,33	8,67	100,00
Kendari	98,68	1,32	100,00
Baubau	97,09	2,91	100,00
Sulawesi Tenggara	94,66	5,34	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.4

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	95,88	4,12	100,00
Muna	91,52	8,48	100,00
Konawe	97,16	2,84	100,00
Kolaka	98,41	1,59	100,00
Konawe Selatan	96,11	3,89	100,00
Bombana	94,38	5,62	100,00
Wakatobi	94,84	5,16	100,00
Kolaka Utara	95,85	4,15	100,00
Buton Utara	94,59	5,41	100,00
Konawe Utara	98,22	1,78	100,00
Kolaka Timur	93,95	6,05	100,00
Konawe Kepulauan	98,25	1,75	100,00
Muna Barat	94,86	5,14	100,00
Buton Tengah	87,63	12,37	100,00
Buton Selatan	92,94	7,06	100,00
Kendari	99,30	0,70	100,00
Baubau	97,52	2,48	100,00
Sulawesi Tenggara	96,03	3,97	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Berumur 15–24 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis (persen), 2023

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	100,00	0,00	100,00
Muna	100,00	0,00	100,00
Konawe	100,00	0,00	100,00
Kolaka	100,00	0,00	100,00
Konawe Selatan	100,00	0,00	100,00
Bombana	100,00	0,00	100,00
Wakatobi	100,00	0,00	100,00
Kolaka Utara	100,00	0,00	100,00
Buton Utara	98,61	1,39	100,00
Konawe Utara	100,00	0,00	100,00
Kolaka Timur	95,73	4,27	100,00
Konawe Kepulauan	100,00	0,00	100,00
Muna Barat	100,00	0,00	100,00
Buton Tengah	100,00	0,00	100,00
Buton Selatan	100,00	0,00	100,00
Kendari	100,00	0,00	100,00
Baubau	100,00	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	99,78	0,22	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.5

Perempuan

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	100,00	0,00	100,00
Muna	98,76	1,24	100,00
Konawe	100,00	0,00	100,00
Kolaka	100,00	0,00	100,00
Konawe Selatan	100,00	0,00	100,00
Bombana	100,00	0,00	100,00
Wakatobi	97,37	2,63	100,00
Kolaka Utara	100,00	0,00	100,00
Buton Utara	100,00	0,00	100,00
Konawe Utara	100,00	0,00	100,00
Kolaka Timur	100,00	0,00	100,00
Konawe Kepulauan	100,00	0,00	100,00
Muna Barat	100,00	0,00	100,00
Buton Tengah	100,00	0,00	100,00
Buton Selatan	100,00	0,00	100,00
Kendari	100,00	0,00	100,00
Baubau	100,00	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	99,83	0,17	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.6

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	100,00	0,00	100,00
Muna	99,39	0,61	100,00
Konawe	100,00	0,00	100,00
Kolaka	100,00	0,00	100,00
Konawe Selatan	100,00	0,00	100,00
Bombana	100,00	0,00	100,00
Wakatobi	98,65	1,35	100,00
Kolaka Utara	100,00	0,00	100,00
Buton Utara	99,30	0,70	100,00
Konawe Utara	100,00	0,00	100,00
Kolaka Timur	97,82	2,18	100,00
Konawe Kepulauan	100,00	0,00	100,00
Muna Barat	100,00	0,00	100,00
Buton Tengah	100,00	0,00	100,00
Buton Selatan	100,00	0,00	100,00
Kendari	100,00	0,00	100,00
Baubau	100,00	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	99,80	0,20	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 4.7 Persentase Penduduk Berumur 15–59 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis (persen), 2023

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	99,26	0,74	100,00
Muna	97,99	2,01	100,00
Konawe	99,30	0,70	100,00
Kolaka	99,75	0,25	100,00
Konawe Selatan	99,34	0,66	100,00
Bombana	98,38	1,62	100,00
Wakatobi	98,43	1,57	100,00
Kolaka Utara	97,41	2,59	100,00
Buton Utara	98,71	1,29	100,00
Konawe Utara	99,62	0,38	100,00
Kolaka Timur	97,35	2,65	100,00
Konawe Kepulauan	98,90	1,10	100,00
Muna Barat	98,41	1,59	100,00
Buton Tengah	98,19	1,81	100,00
Buton Selatan	98,31	1,69	100,00
Kendari	99,98	0,02	100,00
Baubau	98,60	1,40	100,00
Sulawesi Tenggara	98,93	1,07	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.8

Perempuan

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	97,67	2,33	100,00
Muna	94,94	5,06	100,00
Konawe	98,52	1,48	100,00
Kolaka	99,02	0,98	100,00
Konawe Selatan	98,89	1,11	100,00
Bombana	96,86	3,14	100,00
Wakatobi	98,58	1,42	100,00
Kolaka Utara	98,27	1,73	100,00
Buton Utara	98,39	1,61	100,00
Konawe Utara	99,09	0,91	100,00
Kolaka Timur	97,67	2,33	100,00
Konawe Kepulauan	99,40	0,60	100,00
Muna Barat	96,69	3,31	100,00
Buton Tengah	96,62	3,38	100,00
Buton Selatan	96,96	3,04	100,00
Kendari	100,00	0,00	100,00
Baubau	99,57	0,43	100,00
Sulawesi Tenggara	98,32	1,68	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.9

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Mampu	Tidak Mampu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	98,44	1,56	100,00
Muna	96,37	3,63	100,00
Konawe	98,91	1,09	100,00
Kolaka	99,39	0,61	100,00
Konawe Selatan	99,11	0,89	100,00
Bombana	97,62	2,38	100,00
Wakatobi	98,51	1,49	100,00
Kolaka Utara	97,83	2,17	100,00
Buton Utara	98,55	1,45	100,00
Konawe Utara	99,37	0,63	100,00
Kolaka Timur	97,51	2,49	100,00
Konawe Kepulauan	99,15	0,85	100,00
Muna Barat	97,50	2,50	100,00
Buton Tengah	97,35	2,65	100,00
Buton Selatan	97,61	2,39	100,00
Kendari	99,99	0,01	100,00
Baubau	99,10	0,90	100,00
Sulawesi Tenggara	98,62	1,38	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 4.10 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan (persen), 2023

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah		
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	5,14	17,05	7,81	5,58
Muna	5,27	18,12	8,36	4,74
Konawe	4,97	13,43	4,65	5,29
Kolaka	4,30	14,01	4,59	6,11
Konawe Selatan	4,78	13,86	5,37	3,94
Bombana	9,12	13,68	3,59	4,50
Wakatobi	5,14	15,22	6,17	5,06
Kolaka Utara	6,25	10,35	7,60	3,92
Buton Utara	6,35	15,19	7,16	7,27
Konawe Utara	4,97	13,21	6,34	4,83
Kolaka Timur	7,12	11,92	7,09	4,69
Konawe Kepulauan	4,72	16,07	5,01	4,93
Muna Barat	6,45	15,85	7,94	5,62
Buton Tengah	11,40	17,18	8,81	6,78
Buton Selatan	9,31	17,77	7,11	5,10
Kendari	3,66	12,96	5,04	6,41
Baubau	4,80	12,43	6,93	6,01
Sulawesi Tenggara	5,57	14,09	6,01	5,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.10

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Masih Sekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
	Diploma I s.d Universitas	Jumlah yang Masih Sekolah		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	2,87	33,31	61,54	100,00
Muna	3,46	34,69	60,04	100,00
Konawe	1,89	25,26	69,76	100,00
Kolaka	2,03	26,74	68,97	100,00
Konawe Selatan	2,39	25,57	69,65	100,00
Bombana	2,00	23,77	67,12	100,00
Wakatobi	2,07	28,52	66,33	100,00
Kolaka Utara	1,94	23,82	69,94	100,00
Buton Utara	1,95	31,57	62,08	100,00
Konawe Utara	2,34	26,72	68,31	100,00
Kolaka Timur	1,59	25,27	67,60	100,00
Konawe Kepulauan	1,77	27,77	67,51	100,00
Muna Barat	0,60	30,02	63,53	100,00
Buton Tengah	2,22	34,99	53,61	100,00
Buton Selatan	3,05	33,04	57,64	100,00
Kendari	9,91	34,32	62,02	100,00
Baubau	7,48	32,85	62,36	100,00
Sulawesi Tenggara	3,69	29,09	65,35	100,00

Catatan : Perbedaan angka disebabkan oleh pembulatan angka

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.10

Perempuan

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah		
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	8,01	15,69	5,07	7,29
Muna	8,44	15,22	6,87	5,60
Konawe	4,43	13,75	5,37	5,45
Kolaka	4,89	11,54	5,13	5,32
Konawe Selatan	6,15	13,24	4,66	7,13
Bombana	6,82	14,01	5,60	5,98
Wakatobi	8,52	13,55	4,53	5,68
Kolaka Utara	6,78	13,53	5,28	4,16
Buton Utara	9,55	13,24	7,79	4,14
Konawe Utara	7,37	13,56	4,44	5,70
Kolaka Timur	6,58	13,06	4,60	4,92
Konawe Kepulauan	7,34	14,49	4,14	4,88
Muna Barat	8,76	12,70	6,92	4,91
Buton Tengah	17,76	14,19	7,00	6,56
Buton Selatan	10,88	15,32	6,69	4,13
Kendari	4,60	10,17	4,83	7,57
Baubau	5,77	11,08	5,79	6,14
Sulawesi Tenggara	5,57	12,95	5,43	5,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.10

Perempuan

Kabupaten/Kota	Masih Sekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
	Diploma I s.d Universitas	Jumlah yang Masih Sekolah		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	2,79	30,84	61,15	100,00
Muna	1,85	29,54	62,02	100,00
Konawe	3,20	27,77	67,80	100,00
Kolaka	4,45	26,44	68,67	100,00
Konawe Selatan	2,16	27,19	66,66	100,00
Bombana	1,46	27,05	66,13	100,00
Wakatobi	2,36	26,11	65,37	100,00
Kolaka Utara	1,97	24,94	68,28	100,00
Buton Utara	3,11	28,28	62,17	100,00
Konawe Utara	2,61	26,30	66,32	100,00
Kolaka Timur	1,74	24,32	69,11	100,00
Konawe Kepulauan	1,75	25,26	67,41	100,00
Muna Barat	1,89	26,43	64,81	100,00
Buton Tengah	1,96	29,71	52,53	100,00
Buton Selatan	3,80	29,95	59,17	100,00
Kendari	11,82	34,39	61,01	100,00
Baubau	8,71	31,72	62,51	100,00
Sulawesi Tenggara	4,32	28,66	64,53	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.10

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah		
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	6,59	16,36	6,43	6,44
Muna	6,95	16,59	7,58	5,19
Konawe	4,71	13,59	5,00	5,37
Kolaka	4,59	12,79	4,86	5,72
Konawe Selatan	5,46	13,55	5,02	5,53
Bombana	7,96	13,85	4,60	5,24
Wakatobi	6,91	14,34	5,31	5,39
Kolaka Utara	6,78	11,92	6,46	4,04
Buton Utara	9,55	14,22	7,47	5,71
Konawe Utara	6,11	13,38	5,43	5,24
Kolaka Timur	6,85	12,48	5,85	4,80
Konawe Kepulauan	6,04	15,27	4,57	4,91
Muna Barat	7,65	14,22	7,41	5,25
Buton Tengah	14,79	15,58	7,85	6,66
Buton Selatan	10,12	16,51	6,90	4,60
Kendari	4,13	11,56	4,93	6,99
Baubau	5,30	11,74	6,34	6,07
Sulawesi Tenggara	6,19	13,51	5,71	5,64

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.10

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Masih Sekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
	Diploma I s.d Universitas	Jumlah yang Masih Sekolah		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	2,83	32,06	61,34	100,00
Muna	2,61	31,97	61,09	100,00
Konawe	2,53	26,49	68,80	100,00
Kolaka	3,23	26,59	68,82	100,00
Konawe Selatan	2,28	26,38	68,16	100,00
Bombana	1,73	25,42	66,62	100,00
Wakatobi	2,22	27,26	65,83	100,00
Kolaka Utara	1,95	24,37	69,12	100,00
Buton Utara	2,53	29,93	62,13	100,00
Konawe Utara	2,47	26,52	67,36	100,00
Kolaka Timur	1,66	24,80	68,35	100,00
Konawe Kepulauan	1,76	26,50	67,46	100,00
Muna Barat	1,27	28,16	64,19	100,00
Buton Tengah	2,08	32,17	53,03	100,00
Buton Selatan	3,44	31,44	58,43	100,00
Kendari	10,87	34,35	61,51	100,00
Baubau	8,11	32,27	62,44	100,00
Sulawesi Tenggara	4,01	28,87	64,93	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Tabel 4.11 Persentase Penduduk Berumur 5–24 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan (persen), 2023

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah		
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	7,20	39,34	18,03	12,87
Muna	8,80	40,57	18,72	9,93
Konawe	7,56	34,71	12,02	13,32
Kolaka	8,15	35,60	11,67	14,35
Konawe Selatan	8,77	35,86	13,90	9,86
Bombana	13,72	34,66	9,09	11,08
Wakatobi	8,14	38,19	15,50	12,71
Kolaka Utara	11,34	27,42	19,44	10,38
Buton Utara	8,37	36,12	17,01	16,45
Konawe Utara	9,03	32,57	15,62	11,61
Kolaka Timur	14,19	31,10	18,00	12,23
Konawe Kepulauan	10,18	39,12	12,19	11,76
Muna Barat	8,08	37,76	18,92	13,39
Buton Tengah	11,64	37,83	19,40	14,93
Buton Selatan	11,22	38,63	15,46	10,81
Kendari	7,30	29,97	11,64	14,51
Baubau	7,30	28,76	16,02	13,89
Sulawesi Tenggara	9,10	34,34	14,58	12,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.11

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Masih Sekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
	Diploma I s.d Universitas	Jumlah yang Masih Sekolah		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	5,09	75,53	17,46	100,00
Muna	3,80	73,02	18,18	100,00
Konawe	4,43	64,49	27,96	100,00
Kolaka	3,52	65,13	26,72	100,00
Konawe Selatan	5,57	65,19	26,04	100,00
Bombana	2,18	57,01	29,27	100,00
Wakatobi	3,21	69,60	22,25	100,00
Kolaka Utara	2,66	59,91	28,75	100,00
Buton Utara	1,79	71,38	20,25	100,00
Konawe Utara	5,23	65,03	25,94	100,00
Kolaka Timur	3,55	64,89	20,92	100,00
Konawe Kepulauan	3,56	66,63	23,19	100,00
Muna Barat	1,30	71,37	20,55	100,00
Buton Tengah	2,20	74,36	13,99	100,00
Buton Selatan	4,76	69,67	19,11	100,00
Kendari	19,98	76,11	16,59	100,00
Baubau	13,03	71,70	21,00	100,00
Sulawesi Tenggara	6,94	68,43	22,47	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.11

Perempuan

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah		
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	6,66	38,33	12,38	17,62
Muna	8,14	40,06	18,10	14,27
Konawe	7,35	35,56	13,88	14,09
Kolaka	8,99	29,95	13,30	13,44
Konawe Selatan	8,60	34,17	12,04	18,22
Bombana	6,49	37,29	14,89	15,81
Wakatobi	6,77	37,88	12,41	15,87
Kolaka Utara	9,63	35,22	14,16	10,44
Buton Utara	10,28	33,12	19,48	10,36
Konawe Utara	13,36	32,65	10,68	13,72
Kolaka Timur	7,42	36,52	12,86	13,11
Konawe Kepulauan	11,55	36,80	10,51	12,41
Muna Barat	9,51	34,20	18,64	13,23
Buton Tengah	10,22	34,92	17,23	16,12
Buton Selatan	10,21	36,58	15,97	9,54
Kendari	9,07	23,13	11,00	16,31
Baubau	9,22	26,32	13,76	14,58
Sulawesi Tenggara	8,66	32,73	13,73	14,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.11

Perempuan

Kabupaten/Kota	Masih Sekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
	Diploma I s.d Universitas	Jumlah yang Masih Sekolah		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	5,18	73,51	19,83	100,00
Muna	2,97	75,40	16,46	100,00
Konawe	8,02	71,55	21,10	100,00
Kolaka	7,78	64,47	26,54	100,00
Konawe Selatan	4,39	68,82	22,58	100,00
Bombana	2,70	70,69	22,82	100,00
Wakatobi	3,68	69,84	23,40	100,00
Kolaka Utara	2,12	61,94	28,43	100,00
Buton Utara	4,39	67,36	22,36	100,00
Konawe Utara	4,15	61,21	25,43	100,00
Kolaka Timur	3,78	66,27	26,31	100,00
Konawe Kepulauan	2,13	61,84	26,62	100,00
Muna Barat	4,11	70,18	20,31	100,00
Buton Tengah	3,13	71,40	18,39	100,00
Buton Selatan	6,52	68,61	21,18	100,00
Kendari	23,33	73,77	17,16	100,00
Baubau	15,42	70,07	20,71	100,00
Sulawesi Tenggara	8,53	69,76	21,59	100,00

Catatan : Perbedaan angka disebabkan oleh pembulatan angka

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.11

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah		
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	6,93	38,85	15,26	15,20
Muna	8,48	40,32	18,42	12,04
Konawe	7,45	35,13	12,94	13,70
Kolaka	8,56	32,83	12,47	13,90
Konawe Selatan	8,68	35,02	12,97	14,02
Bombana	10,17	35,95	11,93	13,40
Wakatobi	7,46	38,04	13,96	14,28
Kolaka Utara	10,50	31,24	16,85	10,41
Buton Utara	9,30	34,66	18,22	13,48
Konawe Utara	11,12	32,61	13,24	12,63
Kolaka Timur	10,95	33,69	15,54	12,65
Konawe Kepulauan	10,86	37,97	11,36	12,08
Muna Barat	8,78	36,02	18,78	13,31
Buton Tengah	10,92	36,36	18,30	15,53
Buton Selatan	10,72	37,62	15,72	10,19
Kendari	8,19	26,53	11,32	15,42
Baubau	8,28	27,52	14,87	14,24
Sulawesi Tenggara	8,88	33,54	14,16	13,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.11

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Masih Sekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
	Diploma I s.d Universitas	Jumlah yang Masih Sekolah		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	5,13	74,44	18,63	100,00
Muna	3,40	74,18	17,34	100,00
Konawe	6,19	67,95	24,60	100,00
Kolaka	5,61	64,81	26,63	100,00
Konawe Selatan	4,98	67,00	24,32	100,00
Bombana	2,43	63,71	26,11	100,00
Wakatobi	3,44	69,72	22,82	100,00
Kolaka Utara	2,39	60,90	28,59	100,00
Buton Utara	3,06	69,42	21,28	100,00
Konawe Utara	4,71	63,19	25,69	100,00
Kolaka Timur	3,66	65,55	23,50	100,00
Konawe Kepulauan	2,85	64,26	24,89	100,00
Muna Barat	2,67	70,79	20,43	100,00
Buton Tengah	2,67	72,86	16,21	100,00
Buton Selatan	5,63	69,15	20,13	100,00
Kendari	21,67	74,93	16,88	100,00
Baubau	14,25	70,87	20,85	100,00
Sulawesi Tenggara	7,72	69,09	22,03	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

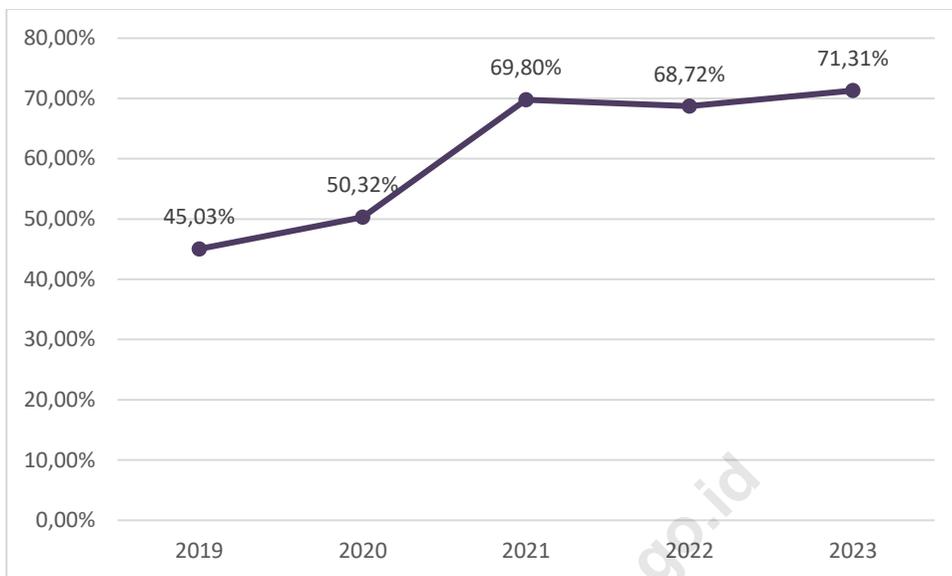
KEGIATAN PESERTA DIDIK



Terbitnya KEPPRES No 17 Tahun 2023 yang menetapkan berakhirnya status pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia mengembalikan metode pembelajaran menjadi tatap muka setelah selama tahun 2020–2022 metode pembelajaran yang berlaku adalah metode pembelajaran secara daring. Dengan adanya perubahan metode pembelajaran ini maka pada bab ini akan dilihat apakah terdapat perubahan kegiatan peserta didik dalam hal akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maupun kegiatan bekerja dan atau melakukan pekerjaan rumah tangga pada tahun 2023.

5.1 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

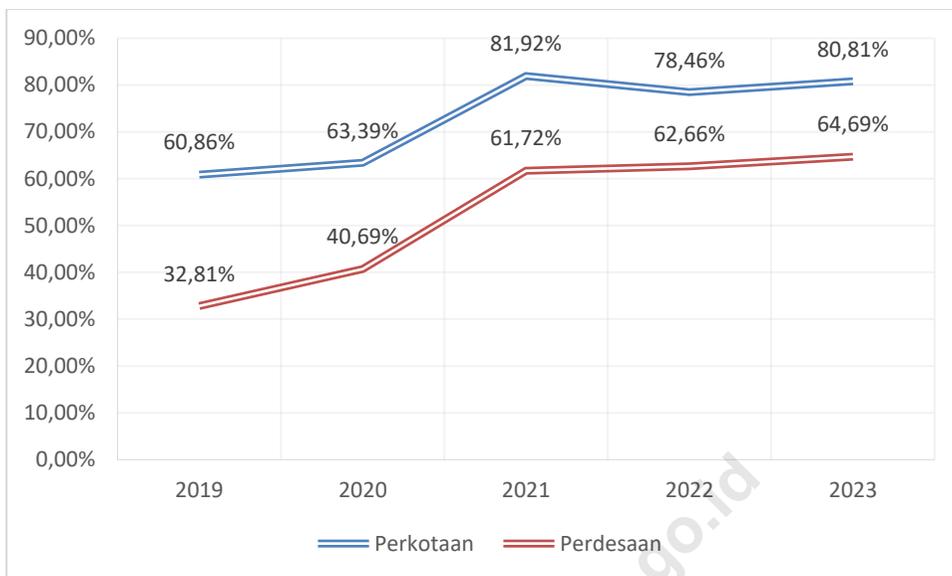
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, khususnya bagi peserta didik di Indonesia. TIK telah membuka pintu bagi pendidikan jarak jauh dan pembelajaran *online*. Ini memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, tanpa harus berada di tempat fisik yang sama dengan lembaga pendidikan. Penggunaan TIK untuk siswa selama masa COVID-19 telah membantu menjaga kontinuitas pembelajaran, meskipun adanya pembatasan fisik yang menghalangi kegiatan tatap muka di sekolah. Walaupun status pandemi telah berakhir sehingga metode pembelajaran kembali menggunakan metode tatap muka, TIK tetap sangat diperlukan guna mengakses materi pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023

Gambar 5.1 Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Internet (persen), 2019–2023

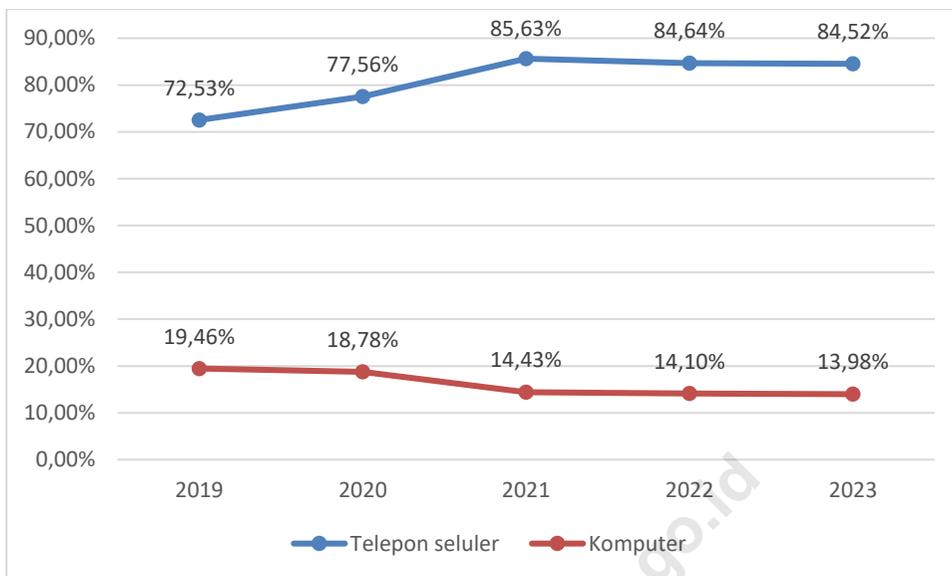
Gambar 5.1 menunjukkan adanya pola penggunaan internet periode tahun 2019–2023 yang cenderung mengalami peningkatan oleh peserta didik usia 5–24 tahun. Pandemi memicu penggunaan TIK yang signifikan pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 19,48 persen poin dibandingkan tahun 2020. Meski pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 69,80 persen pada tahun 2021 menjadi 68,72 persen, kemudian di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan penggunaan TIK sebesar 71,33 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penggunaan TIK saat ini merupakan salah satu sarana yang diperlukan bukan hanya ketika pandemi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023

Gambar 5.2 Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Internet menurut Wilayah (persen), 2019–2023

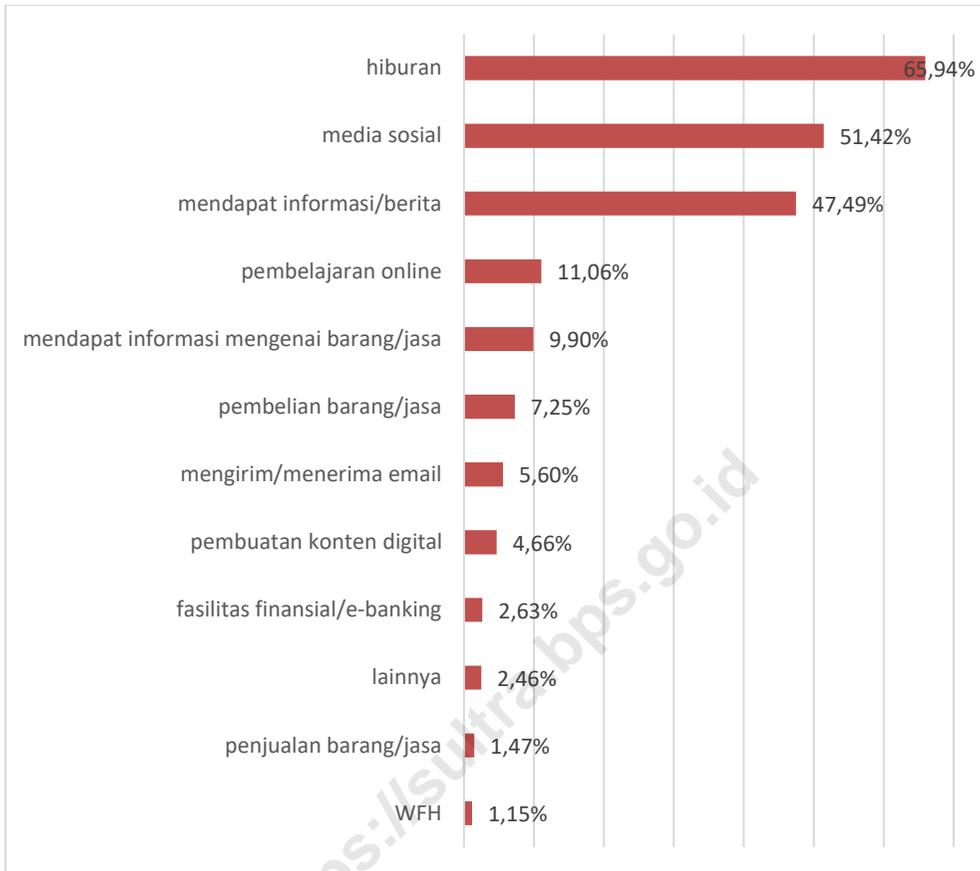
Gambar 5.2 menunjukkan bahwa penggunaan internet di Sulawesi Tenggara masih didominasi pada wilayah perkotaan. Pada tahun 2019, dari 100 orang peserta didik di wilayah perdesaan, hanya 33 orang yang menggunakan internet. Hal ini berbanding terbalik dengan peserta didik di wilayah perkotaan dimana penggunaan internet telah mencapai 60,86 persen atau dari 100 orang peserta didik, sebanyak 60 orang telah menggunakan internet. Terjadinya pandemi Covid-19 memicu kenaikan penggunaan internet di wilayah perdesaan menjadi 61,72 persen pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan persentase penggunaan di wilayah perkotaan pada tahun 2022, namun hal tersebut berbeda dengan di wilayah perdesaan yang mengalami kenaikan penggunaan internet.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023

Gambar 5.3 Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer (persen), 2019–2023

Gambar 5.3 menunjukkan bahwa sekitar 84,52 persen peserta didik usia 5–24 tahun di Sulawesi Tenggara menggunakan telepon seluler dan 13,98 persen yang menggunakan komputer. Penggunaan telepon seluler meningkat pesat pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2019 meski sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Sebaliknya, penggunaan komputer terus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi telepon seluler semakin pesat hingga dapat digunakan untuk melakukan beberapa fungsi komputer (Intan dkk, 2017).



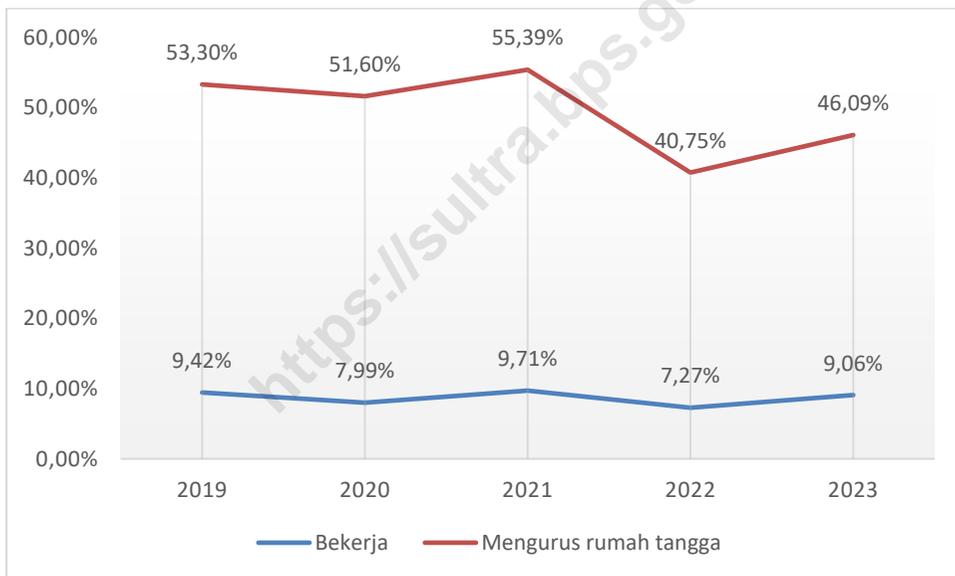
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Gambar 5.4 Persentase Peserta Didik Usia 5–24 Tahun yang Menggunakan Internet berdasarkan Tujuan Penggunaan (persen), 2023

Gambar 5.4 menunjukkan bahwa penggunaan internet dengan tujuan untuk pembelajaran daring tidak menjadi prioritas utama. Tujuan penggunaan internet didominasi untuk tujuan hiburan sebesar 65,94 persen dan media sosial sebesar 51,42persen. Sementara itu, hanya 11,06 persen penggunaan internet untuk pembelajaran daring oleh peserta didik di tahun 2023. Rendahnya penggunaan internet untuk pembelajaran daring kemungkinan disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan secara tatap muka pada tahun 2023.

5.2 Aktivitas Peserta Didik Selain Sekolah

Selain bersekolah, peserta didik tentunya memiliki berbagai macam kegiatan lainnya seperti mengurus rumah tangga dan bekerja. Hal ini dikarenakan, usia peserta didik yang dianalisis pada publikasi ini yaitu yang berusia 5-24 tahun beririsan dengan usia bekerja (minimal 13 tahun untuk anak melakukan pekerjaan ringan menurut UU No. 13 Tahun 2003) dan usia perkawinan (minimal 19 tahun menurut UU No. 16 Tahun 2019). Akan tetapi, karena tujuan utama publikasi ini adalah untuk melihat aktivitas peserta didik secara keseluruhan, maka analisis yang digunakan dalam melihat kegiatan/aktivitas lain dibatasi pada peserta didik yang berusia 10–24 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Gambar 5.5 Persentase Peserta Didik Usia 10–24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga (persen), 2019–2023

Gambar 5.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat kenaikan aktivitas peserta didik untuk bekerja dan mengurus rumah tangga dimana aktivitas mengurus rumah tangga naik sebesar 5,34 persen poin dari tahun 2022 sedangkan aktivitas bekerja mengalami kenaikan sekitar 1,79 persen poin menjadi 9,06 persen. Jika dilihat pada gambar, penurunan maupun kenaikan persentase aktivitas bekerja

memiliki tren yang hampir sama dengan aktivitas mengurus rumah tangga. Meskipun aktivitas mengurus rumah tangga naik cukup signifikan pada tahun 2023, namun secara tren sejak tahun 2019 terus mengalami penurunan sebesar 7,21 persen poin dari 53,30 persen menjadi 46,09 persen pada tahun 2023.

<https://sultra.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Pendidikan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Pendidikan 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Pendidikan 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Pedoman Susenas Maret 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. 2020. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Bappenas.
- Intan dkk. 2017. Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado. . e-journal Acta Diurna_ Volume VI. No. 1. Tahun 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/91161-ID-penggunaan-smartphone-dalam-menunjang-ak.pdf>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Pedoman Pengembangan Sanitasi Sekolah Dasar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Supriyadi Oding. 2009. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kualitas Layanan Terhadap Mutu Pendidikan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*. 6(2). Hlm. 98-111.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Unicef. 2012. *School Readiness: a conceptual framework*

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No. 1, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3135363, Fax. 0401-3122355
Email: bps7400@bps.go.id, Website: sultra.bps.go.id